

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Internet beberapa dekade sebelumnya masih dipandang sebagai sebuah gaya hidup. Pengguna internet masih didominasi oleh para elit masyarakat yang memiliki jaringan relasi yang luas, dan hanya digunakan untuk keperluan komunikasi semata dan masih terbatas. Akan tetapi internet dalam konteks saat ini telah bergeser jauh. Internet bukan lagi dipandang sebagai gaya hidup, tetapi sudah dipandang sebagai salah satu kebutuhan masyarakat akan jasa komunikasi dan arus informasi sebagai modal utama menjalani hidup dan pekerjaan dalam era globalisasi. Banyak perusahaan termasuk perusahaan bisnis kelas menengah bahkan perusahaan kecil sudah menggunakan internet sebagai media pemasaran dan promosi produk. Internet kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa digantikan, apa lagi dengan hadirnya piranti yang sering disebut *smartphone*. Hadirnya piranti *smartphone* ini kemudian semakin menegaskan internet sebagai sebuah syarat mutlak sebuah perkembangan peradaban modern. Banyak atau mungkin hampir semua aplikasi dalam *smartphone* membutuhkan dukungan koneksi internet

dalam pengaplikasiannya, baik dalam tugas tertentu maupun sekadar hiburan. Semakin disadari koneksi internet semakin membantu manusia bukan hanya untuk memperoleh informasi dan komunikasi, tetapi kemudian semakin berkembang untuk fungsi manajemen koordinasi, pemetaan wilayah dan menjadi basis pengembangan sebuah sistem kerja.

Dalam fungsi manajemen koordinasi, pemetaan wilayah, pengawasan lapangan, dan basis pengembangan sistem kerja. Internet mempermudah pekerjaan tertentu, mempercepat penyelesaian tugas tertentu, dan mengurangi biaya pelaksanaan program kerja tertentu. Hal ini tentu saja membuat internet dapat diaplikasikan untuk mengurangi tugas-tugas yang berhubungan dengan data yang sangat banyak, daerah yang sangat luas, dengan alokasi waktu yang singkat, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Dalam konteks kajian ini, dapat dilihat potensi penggunaan internet dan aplikasi pendukung tertentu untuk membangun tugas para pengawas pemilihan umum di lapangan agar dapat bekerja dengan lebih optimal lagi.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih individu-individu untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beragam, mulai dari kepala desa, wakil rakyat di

berbagai tingkat, hingga presiden. Dalam Pemilu, para pemilih disebut sebagai konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan ideologi dan strategi perubahan sosial dalam bentuk visi dan misi tertentu yang terwujud dalam program-program yang biasanya dijanjikan oleh para peserta Pemilu. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam kajian ini, perhatian dan pembahasan lebih akan diarahkan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga dan memonitor proses pelaksanaan Pemilu agar terlaksana sesuai undang-undang.

Bawaslu adalah badan yang diatur Negara untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tindakan pelanggaran dan kecurangan baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, panitia Pemilu (KPU), termasuk juga pengawas Pemilu (Panwaslu) harus dicermati dan diawasi oleh Bawaslu. Dalam rangka penegakkan demokrasi, tugas Bawaslu sebagai lembaga yang berupaya melindungi integritas Pemilu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk pelanggaran, kecurangan, dan kode etik pemilu menjadi rambu-rambu yang mengatur sekaligus menjadi bahan

evaluasi terhadap kinerja Bawaslu. Efisiensi waktu dan kemudahan bagi Bawaslu menjadi kebutuhan bagi setiap pengawas pemilu di lapangan. Teknologi informasi dapat menjadi solusi akan kebutuhan efektifitas dan efisiensi kinerja dari Bawaslu.

Sebagai catatan, para pengawas Pemilu dalam satu kali putaran pemilihan umum saja harus berhadapan dengan berbagai macam data pelanggaran yang harus dipisahkan, diklasifikasikan dan harus ditindak dengan cepat, dalam data yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga independen pemantau Pemilu berbasis akademis. Dalam hasil *press conference* oleh Tim Independen Pemantau Pemilu (TIPP) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) pada Pemilu Presiden 2014, untuk Kabupaten Bantul saja tercatat lebih dari 1437 temuan pelanggaran Pemilu yang tersebar di seluruh wilayah Bantul. Tercatat pelanggaran alat peraga kampanye berjumlah 922 kasus, pelanggaran kampanye 186 kasus, pelanggaran prosedural Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 37 temuan, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya. Data-data tersebut hanya diperoleh dari 135 TPS, artinya tidak seluruh TPS dapat terpantau dengan baik. Dengan kata lain diperlukan sebuah sistem aplikasi yang membantu pengawas

Pemilu memetakan daerah-daerah rawan pelanggaran untuk kemudian dijadikan acuan bagi pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya, baik itu Pemilu legislatif atau Pemilu kepala daerah.

Hal ini dirasa penting dan sangat dapat bermanfaat. Menurut Mohamad Najib (Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014), kesadaran masyarakat akan Pemilu yang bersih, jujur dan adil masih sangat kurang. Pesta demokrasi yang menjadi momen penting berdirinya sebuah pemerintahan, justru banyak diwarnai oleh aksi politik uang, kecurangan-kecurangan, dan pelanggaran kode etik baik oleh panitia Pemilu maupun pengawas Pemilu itu sendiri. Pengawasan Pemilu hanya dilakukan sendiri oleh Bawaslu, tanpa adanya peran aktif dari masyarakat sebagai subyek Pemilu. Hal ini mengindikasikan diperlukan sebuah sistem kerja yang memberdayakan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk dapat melakukan tugas mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pemilihan umum. Cakupan wilayah yang begitu luas dengan ratusan TPS yang tersebar di setiap desa, tentu saja memerlukan sebuah sistem kerja yang membuat pengawas Pemilu dapat mengawasi dengan optimal keseluruhan daerah, belum lagi kontur daerah yang terkadang menyulitkan untuk didatangi para pengawas.

Diperlukan sebuah pemetaan kasus pelanggaran Pemilu sehingga tenaga para pengawas Pemilu dapat difokuskan pada daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran pemilu. Selanjutnya, tenaga pengawas yang terbatas jumlahnya menuntut setiap pengawas harus mampu mengawasi wilayahnya dengan optimal, keterbatasan personil pengawas Pemilu harus bisa dipecahkan dengan pemanfaatan sistem informasi. Selain itu, diperlukan langkah taktis dan strategis untuk menghadapi Pemilu-Pemilu berikutnya yang hanya bisa dilakukan dengan pembelajaran terhadap proses pengawasan Pemilu-Pemilu sebelumnya, untuk itu diperlukan media pembelajaran yang menyediakan data dan gambaran wilayah penyebaran pelanggaran, sehingga para *stake holder* dalam pengawasan Pemilu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang yang mampu mengoptimalkan tugas pengawas Pemilu sebagai amanat Negara demi terciptanya demokrasi yang sesuai konstitusi.

Dari latar belakang tersebut, dalam kajian ini penulis mencoba memanfaatkan teknologi informasi untuk mengkaji dan memetakan kasus penyebaran pelanggaran Pemilu, dengan lebih mengarah pada Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Penyebaran Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari hal tersebut maka rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini adalah sejauh mana sebuah sistem informasi dalam hal sistem informasi geografis (GIS), dapat memberi kemudahan dalam menangani dan memetakan kasus pelanggaran Pemilu.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup skripsi bisa meliputi yaitu:

1. Sistem kerja yang berfungsi untuk menerima laporan pelanggaran dari pengawas Pemilu di Lapangan.
2. Sistem kerja yang berfungsi melakukan pencarian lokasi dan penandaan lokasi dimana pelanggaran atau kecurangan Pemilu terjadi.
3. Sistem kerja yang memberikan fasilitas pemetaan dalam mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan Pemilu dalam setiap wilayah.

Sistem kerja yang menghadirkan data lokasi dan pelanggaran Pemilu.

1.4 Tujuan

Tujuan dalam kajian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memetakan secara geografis

informasi pelanggaran Pemilu berserta koordinatnya, untuk mengoptimalkan kinerja pemantauan Pemilu oleh Bawaslu, dan dapat menjadi data objektif untuk pengawasan-pengawasan Pemilu selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem yang dapat memetakan pelanggaran pemilu.
2. Sistem yang dibangun menghasilkan output berupa gambaran geografis dari setiap kasus pelanggaran Pemilu di wilayah tertentu.

1.6 Manfaat Skripsi

Kajian ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat yaitu:

1. Peta digambarkan pesebaran jenis-jenis pelanggaran Pemilu.
2. Membantu Bawaslu mengevaluasi sejauhmana letak geografis wilayah tertentu berpengaruh terhadap jenis pelanggaran dan kecurangan tertentu.

3. Membantu Bawaslu mengetahui daerah-daerah yang rawan dan laten terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu.
4. Membantu Bawaslu mengatur manajemen pengawasan dengan optimal.

1.7 Judul Skripsi

Judul skripsi ini yang penulisan rumuskan adalah:

“Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tingkat Bawaslu Berbasis Webgis di Kabupaten Bantul”